

ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG

Sabaria^{1*}, Ardillawati Fadlia², Hasriwana³

^{1*}Bisnis Digital Fakultas Ekonomi Bisnis dan Humaniora Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong,

²Program Studi Kewirausahaan, Institut Teknologi dan Sains Muhammadiyah Kolaka Utara

³Program Studi Bisnis Digital, STMIK Amika Soppeng

riasabaria22@gmail.com^{1*}, ardillawatifadliaarsyad25@gmail.com², hasriwana5@gmail.com³

ARTICLE INFO

Riwayat Artikel

Received:20/07/2023

Revised:21/08/2023

Accepted:01/09/2023

Keywords: Effectiveness; Efficiency; revenue budget; Regional Shopping.

Kata Kunci: Efektivitas; Efisiensi; Anggaran Pendapatan; Belanja Daerah.

ABSTRACT

This study aims to determine the effectiveness and efficiency of the use of the regional revenue and expenditure budget in the regional financial management agency of Enrekang Regency. In this study, the method used is a descriptive quantitative analysis method, namely explaining the existing phenomena by using numbers to obtain a picture related to the object of research. The results showed that the level of effectiveness of regional income at the Regional Financial Management Agency of Enrekang T.A 2015-2019 was said to be effective with a presentation of 97.17% each; 93.55; 94.58%; 93.12%; and 91.83%. As for the level of efficiency of the regional expenditure budget at the Regional Financial Management Agency of Enrekang Regency, the 2015 fiscal year is categorized as quite efficient with a percentage of 87.18% in the predicate 80% -90% while for 2016-2019 it is said to be less efficient with each presentation of 90, 48%; 90.22%; 92.65%; and 90.16%.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah pada badan pengelola keuangan daerah kabupaten enrekang. Dalam penelitian ini metode yang digunakan yaitu metode analisis deskriptif kuantitatif yaitu menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk memperoleh gambaran terkait objek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pendapatan daerah pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang T.A 2015-2019 dikatakan efektif dengan presentasi masing-masing sebesar

97,17%; 93,55; 94,58%; 93,12%; dan 91,83%. Sedangkan untuk tingkat efisiensi anggaran belanja daerah pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang T.A 2015 dikategorikan cukup efisien dengan persentase 87,18% berada pada predikat 80%-90% sedangkan untuk tahun 2016-2019 dikatakan kurang efisien dengan presentasi masing-masing sebesar 90,48%; 90,22%; 92,65%; dan 90,16%.

PENDAHULUAN

Sistem anggaran sektor publik dalam pengembangannya telah menjadi instrumen kebijakan yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi. Proses penentuan kebijakan dalam sektor publik melibatkan seluruh komponen masyarakat, untuk mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan masyarakat luas, yang terdiri atas anggota dewan, organisasi sosial dan politik, lembaga swadaya masyarakat (LSM), akademisi, yayasan dan masyarakat umum. Proses ini merupakan proses penjangkaran aspirasi publik yang tidak ada dalam mekanisme penentuan kebijakan pada sektor swasta/privat/bisnis.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014, tentang pemerintah daerah menjelaskan bahwa, "Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah". APBD terdiri dari anggaran pendapatan, belanja daerah dan pembiayaan, pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan penerimaan lain-lain. Bagian dana perimbangan, yang meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), kemudian pendapatan yang sah seperti dana hibah atau dana darurat. Belanja daerah terdiri atas empat bagian yaitu belanja pegawai, belanja modal, belanja barang dan jasa dan belanja lainnya. Pembiayaan yaitu semua penerimaan yang perlu dikeluarkan yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang berjalan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah yang menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah (Trianto, 2016).

Pemerintah daerah kabupaten enrekang merupakan salah satu pemerintah daerah yang telah menyelenggarakan otonomi daerah. Menurut pasal 1 butir h Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah, sebagai daerah otonom pemerintah kabupaten diberi wewenang dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan daerah.

TINJAUAN PUSTAKA

Anggaran

Pada Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran (Rawung, 2021). Sedangkan menurut (Azmi & Jusmani, 2017) menjeaskan bahwa anggaran adalah pertanggungjawaban dari pemegang manajemen organisasi untuk memberikan segala aktivitas dan kegiatan organisasi atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang publik. Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran (Suardana & Suryanawa, 2013).

Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan kas daerah yang menambah ekuitas dan pada periode tahun anggaran yang bersangkutan 23 yang menjadi hak pemerintah daerah, dan yang tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah (Sudarmana & Sudiarta, 2020). Untuk itu perlu adanya langkah – langkah nyata berupa perbaikan, penyempurnaan, pertanggung jawaban, dan pengawasan anggaran.

Belanja Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005, belanja adalah semua pengeluaran rutin dari rekening kas umum yang menguraikan ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran. Sedangkan menurut Siregar. belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

Standar Akuntansi Pemerintah SAP menyatakan belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Definisi lain berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan permendagri Nomor 59 Tahun 2007 dan adanya perubahan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua, Belanja dikelompokkan menjadi: 1. Belanja Langsung, adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan program dan kegiatan Belanja langsung terdiri dari belanja: a. Belanja pegawai b. Belanja barang dan jasa c. Belanja modal 2. Belanja Tidak Langsung, merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari: a. Belanja pegawai b. Belanja bunga c. Belanja subsidi 3. Belanja Modal, merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya operasi dan pemeliharaan. Efektivitas sebagai ukuran keberhasilan dari suatu organisasi dalam merealisasikan targetnya. Bila organisasi berhasil dalam merealisasikan target/tujuannya, maka dapat dikatakan bahwa

organisasi tersebut berjalan secara efektif (Rajendra Ghazian Zhafiri, 2023).

Efektivitas

Efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari organisasi (Bungkaes et al., 2013). Efektivitas juga berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dapat dikatakan efektif jika suatu kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditentukan. Menurut (Harefa et al., 2022) efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi telah mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan efektif. Indikator efektif menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (outcome) dari keluaran (output) program dalam mencapai tujuan program. semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik dapat didefinisikan sebagai aktivitas yang terdiri dari mencatat, mengklarifikasikan dan melaporkan kejadian atau transaksi ekonomi yang akhirnya akan menghasilkan suatu informasi keuangan yang akan dibutuhkan oleh pihak-pihak tertentu untuk pengambilan keputusan yang diterapkan pada pengelolaan dana publik di lembaga-lembaga tinggi Negara dan departemen departemen dibawahnya (I.Pangkey., 2015).

Anggaran Sektor Publik

Anggaran sektor publik adalah perencanaan finansial tentang perkiraan pengeluaran dan penerimaan yang diharapkan akan tercapai di masa mendatang dengan melihat data yang diperoleh dari masa lalu sebagai acuan penetapan anggaran (Milenia et al., 2022)

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu berupa Dokumentasi, dimana dapat diperoleh

melalui dokumen atau data berupa struktur organisasi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang, Visi dan Misi, Fungsi dan Tugas, dan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2015-2019. Dengan menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif.

1. Efektivitas dan Efisiensi Pendapatan dan Belanja Daerah

Tingkat efektivitas diukur dengan cara membandingkan antara realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD (yang ditetapkan).

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD yang ditetapkan}} \times 100\%$$

SUMBER: (Abdul Halim, 2007:169)

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690. 900-327 tahun 1996, kriteria anggaran belanja sebagai berikut:

- > 100% Sangat Efektif
- 90% - 100% Efektif

Tahun	Anggaran	Realisasi	Persentase (%)	Analisis Efektif
2015	1.035.884.730.402,00	903.110.164.897,00	87,18	Cukup Efisien
2016	1.206.155.278.726,00	1.091.335.511.816,00	90,48	Kurang Efisien
2017	1.094.641.986.179,00	987.600.100.370,00	90,22	Kurang Efisien
2018	1.086.284.012.289,00	1.006.485.625.084,78	92,65	Kurang Efisien
2019	1.165.226.358.882,00	1.050.604.284.504,42	90,16	Kurang Efisien

- 80% - 90% Cukup Efektif
- 60% - 80% Kurang Efektif
- < 60% Tidak Efektif

2. Analisis Efisien Belanja

Efisien Belanja diukur dengan Rumus:

$$\text{Rasio Efisien Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Sumber: (Mahmudi, 2007:152)

Kemendagri Nomor 690.900.327 tahun 1996 tentang kriteria untuk mengukur efisiensi pengelolaan keuangan daerah sebagai berikut:

- > 100% Tidak Efisien
- 90% - 100% Kurang Efisien

- 80% -90% Cukup Efisien
- 60% - 80% Efisien
- < 60% Sangat Efisien

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rasio Efektivitas Anggaran Pendapatan Daerah Pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang T.A 2015-2019

Tahun	Anggaran	Realisasi	Persentase (%)	Analisis Efektif
2015	946.648.050.605,00	919.862.386.647,46	97,17	Efektif
2016	1.103.986.718.250,00	1.032.816.629.667,45	93,55	Efektif
2017	1.057.719.428.195,00	1.000.408.602.312,37	94,58	Efektif
2018	1.088.923.277.552,00	1.014.028.741.574,23	93,12	Efektif
2019	1.159.314.356.011,00	1.064.623.987.507,58	91,83	Efektif

Sumber: Data diolah Penulis (2020)

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa rasio efektif pendapatan daerah pada badan pengelola keuangan daerah kabupaten enrekang tahun anggaran 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019 belum mencapai target namun sudah dalam kategori efektif dalam merealisasikan anggaran pendapatan. Hal ini disebabkan karena realisasi pendapatan lebih kecil daripada target anggaran pendapatan yang ditetapkan dengan masing-masing rasio sebesar 97,17%; 93,55%; 94,58%; 93,12; dan 91,83%.

Rasio Efisiensi Anggaran Belanja Daerah Pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang T.A 2015-2019

Sumber: Data diolah Penulis (2020)

Berdasarkan tabel Realisasi Belanja Daerah Pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2015-2019 menunjukkan bahwa realisasi Belanja lebih kecil dibandingkan dengan target anggaran yang ditetapkan. Pada tahun 2015-2016 anggaran Belanja dan Realisasinya mengalami peningkatan sedangkan pada tahun 2017 mengalami penurunan seta kembali mengalami peningkatan pada tahun 2018-2019. Pada Tahun 2015 target anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 1.035.884.730.402,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 903.110.164.897,00 dengan persentase sebesar 87,18%. Pada tahun 2016 target anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 1.206.155.278.726,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.091.335.511.816,00

dengan persentase sebesar 90,48%. Pada tahun 2017 target anggaran Belanja yang ditetapkan sebesar Rp. 1.094.641.986.179,00 dan realisasi anggaran belanja sebesar Rp. 987.600.100.370,00 dengan persentase sebesar 90,22 %. Pada tahun 2018 target anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp. 1.086.284.012.289,00 dan realisasi sebesar Rp. 1.006.485.625.084,78 dengan persentase sebesar 92,65%. Sedangkan pada tahun 2019 target anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp. 1.165.226.358.882,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.050.604.284.504,42 dengan persentase sebesar 90,16%.

Analisis Rasio Efektivitas dan Efisiensi Pendapatan dan Belanja Daerah

1. Rasio Efektif

Anggaran Pendapatan Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2015-2019 berdasarkan hasil penelitian rasio efektif pengelolaan anggaran pendapatan yaitu dengan masing-masing persentase sebesar 97,17%; 93,55%; 94,58%; 93,12%; dan 91,83%. Tingkat efektif anggaran pendapatan yang paling tinggi yaitu pada tahun 2015 dengan persentase 97,17%. Dengan demikian rasio keuangan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang untuk tahun anggaran 2015-2019 dikatakan efektif.

2. Rasio Efisien

Anggaran Belanja Daerah Pada Badan Pengelolaan keuangan Daerah Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2015-2019 berdasarkan hasil penelitian rasio efisien berada pada persentase masing-masing sebesar 87,18%; 90,48%; 90,22%; 92,65%; dan 90,16% dengan penggunaan anggaran masing-masing sebesar Rp. 903.110.164.897,00; Rp. 1.091.335.511.816,00; Rp. 987.600.100.370,00; Rp. 1.006.485.625.084,78; dan Rp. 1.050.604.284.504,42 dari total realisasi anggaran belanja pada tahun 2015 dikatakan cukup efisien karena berada pada tingkat predikat 80%- 90% dan pada tahun 2016-2019 dalam penggunaan anggaran dikatakan kurang efisien dalam melakukan penghematan anggaran belanja. Kurang efisiennya anggaran belanja pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang disebabkan Karena terjadinya perubahan anggaran dan defisit anggaran serta realisasi anggaran belanja menghampiri jumlah target anggaran belanja dan realisasi pendapatan. Hal ini menunjukkan bahwa

Badan Pengelola Keuangan Daerah Belum mengoptimalkan pelaksanaan anggaran belanja baik dalam penggunaan, pengendalian serta pengawasan dalam pengelolaan anggaran sehingga tercapai target efisiensi belanja. Selain itu hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan Rusdi (2018). Penelitian yang dilakukan Rusdi bertujuan untuk melihat tingkat efisiensi belanja menggunakan analisis varians belanja sedangkan pada

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab terdahulu, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Tingkat efektivitas pendapatan daerah pada badan pengelola keuangan daerah Kabupaten Enrekang tahun anggaran 2015-2019 belum mencapai target anggaran yang telah ditetapkan namun telah memenuhi kriteria efektif karena berada pada predikat 90%-100% dengan masing-masing persentase rasio efektif yaitu sebesar 97,17%; 93,55%; 94,58%; 93,12%; dan 91,83%.

2. Tingkat efisiensi belanja daerah pada badan pengelola keuangan daerah Kabupaten Enrekang tahun anggaran 2015 dinilai sudah cukup efisien dengan persentase sebesar 87,18% berada pada predikat 80%-90% sedangkan untuk tahun anggaran 2016-2019 dinilai kurang efisien karena belum berhasil mencapai hasil yang maksimal dengan menggunakan sumber daya yang minimal dan berada pada predikat 90%-100% dengan masing-masing persentase rasio efisien yaitu sebesar 90,48%; 90,22%; 92,65%; dan 90,16%.

Saran

Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang diharapkan untuk dapat mengelola pendapatan dari sektor pajak, potensi Sumber Daya Manusia (SDM) serta Sumber Daya Alam (SDA) yang sangat menunjang peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kepada instansi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang yang telah banyak membantu sehingga dapat terselesaikan penelitian ini, dan terimakasih kepada rekan sekaligus sahabat saya yang telah berpartisipasi dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Azmi, S. A., & Jusmani. (2017). Analisis Efektivitas Pelaksanaan Anggaran Belanja (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kota Palembang. *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, 14(2), 43–55. <https://jurnal.univpgri-palembang.ac.id/index.php/Ekonomika/article/view/1304>
- Bungkaes, H. R., Posumah, J. H., & Kiyai Burhanuddin. (2013). Hubungan Efektivitas Pengelolaan Program Raskin Dengan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Mamahan Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud. *Acta Diurna*, April, 1–23.
- Harefa, N. B., Zebua, S., & Bawamenewi, A. (2022). ANALISIS EFEKTIFITAS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes). *Warta Dharmawangsa*, 16(4), 1002–1009. <https://doi.org/10.46576/wdw.v16i4.2450>
- I. Pangkey., S. P. (2015). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Belanja Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA*, 3(4), 34.
- Milenia, A. F., Sibarani, J. L., & Hidayat, A. (2022). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Realisasi Anggaran sebagai Pengukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten / Kota se-Sumatera Utara. 5(2), 105–113.
- Rajendra Ghazian Zhafiri, S. T. (2023). ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS AND EFFICIENCY OF REGIONAL REVENUE AND EXPENDITURE BUDGET IN THE SERVICE OF COOPERATIONS AND SMEs IN EAST JAVA PROVINCE. *Journal of Economic, Business and Accounting*, 6, 2436–2445.
- Rawung, P. M. (2021). Evaluasi Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja Di Instansi Pemerintah Daerah Pada Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA*, 9(1), 1155–1164. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/32859>
- Suardana, K. J., & Suryanawa, I. K. (2013). Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Pada Kinerja Manajerial Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderasi. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Sudarmana, I. P. A., & Sudiarta, G. M. (2020). Pengaruh Retribusi Daerah Dan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Dinas Pendapatan Daerah. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 9(4), 1338. <https://doi.org/10.24843/ejmunud.2020.v09.i04.p06>
- Trianto, A. (2016). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kota Palembang. *Akuisisi: Jurnal Akuntansi*, 12(1), 65–77. <https://doi.org/10.24127/akuisisi.v12i1.92>